

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Effendi Choirie, 2003, *Privatisasi vs Neo Sosialisme Indonesia*, LP3S, Jakarta.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Badan Pengkajian MPR RI, 2017, *Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Badan Pengkajian MPR RI, Jakarta.
- Djokosoetono, 2006, *Kuliah Hukum Tata Negara*, In-Hill-Co, Jakarta.
- Dwi Utari dan Ismail Hasani, 2013, *Masa Depan Konstitusi RI: Naskah Konferensi Mahkamah Konstitusi dan Pemajuan Hak Konstitusional Warga*, Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta.
- Feri Amsari, 2011, *Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- H.A.S. Natabaya, "Lembaga (tinggi) Negara Menurut UUD 1945" dalam Refly Harun, 2004, *menjaga denyut Konstitusi, Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, 2006, *Mahkamah Konstitusi (Memahami Keberadaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia)*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Imam Hidayat, 2009, *Teori-Teori Politik*, Setara Press, Malang.
- Iriyanto A. Baso Ence, 2008, *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi (Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi)*, Alumni, Bandung.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Konpress, Jakarta.

_____, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

_____, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuna Ilmu Populer, Jakarta.

_____, 2012, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2015, *Konstitusi Bernegara*, Setara Press, Malang.

Jum Anggraini, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

K.C. Wheare, 2005, *Konstitusi-Konstitusi Modern*, Pustaka Eureka, Surabaya.

Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Komisi Anti Korupsi di Luar Negeri*, Direktorat Litbang KPK, Jakarta.

Lilik Mulyadi, 2007, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung.

Mahmuddin Muslim, 2004, *Jalan Panjang Menuju KPTPK*, Gerakan Rakyat Anti Korupsi Indonesia, Jakarta.

M. Nasir, 2003, *Hukum Acara Perdata*, Djambatan, Jakarta.

Mardian Wibowo, 2019, *Kebijakan Hukum Terbuka dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Konsep dan Kajian dalam Pembatasan Kebebasan Pembentuk Undang-Undang*, Rajawali Pers, Depok.

Martitah, 2013, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive Legislature?*, Konstitusi Press, Jakarta.

Maruarar Siahaan, 2006, *Hukum Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (edisi 2)*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

_____, 2015, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Marwan Mas, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Moh. Mahfud MD, 2010, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pers, Jakarta.

_____, *Peranan Mahkamah Knsstitusi dalam pengembangan Hukum Progresif di Indonesia*, dalam Satjipto Rahardj, 2011, *Hukum Progresif: Urgensi dan Kritik*, Epistima Institute dan HuMa, Jakarta.

Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

_____, 2011, *penelitian hukum*, Kencana, Jakarta.

Pilipus M. Hadjon, 1996, *Lembaga Tertinggi dan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara Menurut UUD 1945*, Bina Ilmu, Surabaya.

Poerwasunata, W.J.S, 2003, *Kamus Bahasa Indonesia edisi ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta.

Putera Astomo, 2018, *Ilmu Perundang-Undangan (Teori dan Praktik di Indonesia)*, Rajawali Pers, Depok.

Rafael Raga Maran, 2001, *Pengantar Sosiologi Politik*, Rineka Cipta, Jakarta.

Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soedikno Mertokusumo, 2014, *Penemuan Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022.

C. Jurnal dan Makalah Hukum

Ade Irawan Taufik, 2019, *Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Beberapa Undang-Undang Terkait Kesehatan*, Jurnal Konstitusi, Volume.16, Nomor.4.

Agus Raharjo, 2008, *Problematisasi Asas Retroaktif Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume.8, Nomor.1.

Alya Anira Nugraha, Xavier & Risdiana Izzaty, 2020), *Constitutional Review Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011: Dari Negative Legislator Menjadi Positive Legislator*, Jurnal RechtIdee, Volume.15, Nomor.1

Darmadi Nanang Sri, 2011, *Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Hukum, Volume XXVI, Nomor.2.

Esfandiari, 2014, *Positive Legislature Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Jurnal Hukum, Volume.1, Nomor.1.

Fadzlun Budi Sulisty Nugroho, 2019, *Sifat Keberlakuan Asas Erga Omnes Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi*, Gorontalo Law Review, Volume.29, Nomor.2.

Fetroki Romando, 2007, *Asas Non Retroaktif dan Penyimpangannya Dalam Hukum Di Indonesia*, Jurnal Hukum Unair.

Irmah Wibowo, 2021, “*Masa Jabatan Legislator Di Indonesia Perspektif Siyasa*”, Jurnal AsSaidd, Volume.1, Nomor.1.

Iwan Satriawan dan Tanto Lailam, 2019, *Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentuk Undang-Undang*, Yogyakarta, Jurnal Konstitusi, Volume.16, Nomor.3.

Janpatar Simamora, 2013, *Analisa Yuridis terhadap Model Kewenangan Judicial Review di Indonesia*, Mimbar Hukum, Volume. 25, Nomor.3.

Lusy Liany Kurniawati, 2019, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945*, ADIL: Jurnal Hukum, Volume.10, Nomor.1.

Madon Yanuar, 2020, *Lembaga Constitutional Importance Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Constitutionale, Volume.1, Nomor.1.

Moh. Mahfud MD, 2010, *Menabrak Rambu-Rambu Demi Keadilan Substantif*, Jurnal Konstitusi, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>.

Muchamad Lufti Hakim dan Rasji, 2018, *Penerapan Asas Erga Omnes Dalam Putusan Mahkamah Negative Legislator*. Jurnal Hukum Adigama, Volume.1, Nomor.2.

Muhammad Al Kausar, 2019, “*Pembatasan Periode Masa Jabatan Anggota Legislatif*”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Volume.3, Nomor.3.

Muhammad Dafa Khairullah, 2023, *Sejarah dan Perkembangan Mahkamah Konstitusi Selaku Pemegang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Volume.2, Nomor.1.

Muhammad Rechanda Haidir Madan, 2024, *Polemik Mahkamah Kontitusi Terhadap Pertimbangan Open Legal Policy dalam Putusan Perkara Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*, UNES LAW REVIEW, Volume.6, Nomor.2.

Nurul Qamar, 2012, *Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume.1 Nomor.1.

Purwono Sungkono Raharjo Sari dan Adena Fitri Puspita, 2022, *Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dan Positive Legislator*, Sovereignty, Volume.1, Nomor.4.

Raraniken Ayuning Bintari, 2023, *Tinjauan Yuridis Perpanjangan Masa Jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022)*, RECHT STUDIO SUM LAW REVIEW, Volume.02, Nomor.02.

Ro'is Alfauzi dan Orien Effendi, 2017, *Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme di Negara Demokrasi*, Politica, Volume. 7, Nomor.2.

Suharyo, 2014, *Optimalisasi Pemberantasan Korupsi dalam Era Desentralisasi di Indonesia*, Jurnal Rechtsvinding, Volume.3, Nomor.3.

Suparto, 2017, *“Perbedaan Tafsir Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara Pemilihan Umum Serentak”*, Jurnal Yudisial, Volume. 10, Nomor. 1.

Syaifullahil Maslul, 2022, *JUDICIAL RESTRAINT DALAM PENGUJIAN KEWENANGAN JUDICIAL REVIEW DI MAHKAMAH AGUNG Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XVI/2018 dan Nomor 30/PUU-XIII/2015*, Volume.15, Nomor.3.

Ulang Mangun Sosiawan, 2019, *Peran Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Volume. 19, Nomor.4.

D. Internet

Admin koridor.co.id, 27 Mei 2023, *MK dianggap tak konsisten terkait putusan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK*, <https://koridor.co.id/polhukam/mk-dianggap-tak-konsisten-terkait-putusan-perpanjangan-masa-jabatan-pimpinan-kpk/>.

Admin KOMISI III dpr.go.id, 29 Mei 2023, *Kebijakan Masa Jabatan Pimpinan KPK*

Kewenangan Legislatif, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/44725/t/Kebijakan%20Masa%20Jabatan%20Pimpinan%20KPK%20Kewenangan%20Legislatif>.

Badan Kepegawaian Daerah, 2021, *Jenis Jabatan Aparatur Sipil Negara*, <https://bkpp.baritokualakab.go.id/jenis-jabatan-aparatur-sipil-negara/>.

Fiqih Rahmawati, 28 Mei 2023, *Masa Jabatan Pimpinan KPK Diperpanjang 5 Tahun, Pengamat Hukum: Tidak Ada Urgensinya*, Masa Jabatan Pimpinan KPK Diperpanjang 5 Tahun, Pengamat Hukum: Tidak Ada Urgensinya (kompas.tv).

Kompastv-Lampung, 12 Juni 2023, *Soal Masa Jabatan Ketua KPK, Mahfud MD Nilai Putusan MK Inkonsisten !*, Soal Masa Jabatan Ketua KPK, Mahfud MD Nilai Putusan MK Inkonsisten ! (ampproject.org).

M Rosseno Aji, 27 Mei 2023, *Bivitri Susanti Sebut Perpanjang Masa Jabatan Pimpinan KPK Seharusnya Tak Berlaku untuk Firli Bahuri Cs*, <https://nasional.tempo.co/read/1730445/bivitri-susanti-sebut-perpanjang-masa-jabatan-pimpinan-kpk-seharusnya-tak-berlaku-untuk-firli-bahuri-cs>, tempo.co.

Nurul Fitri Ramadhani, 2022, *Mengapa Masa Jabatan Presiden Harus Dibatasi ?*, <https://theconversation.com/mengapa-masa-jabatan-presiden-harus-dibatasi-181579>, THE CONVERSATION.

Rizki Aslendra , 2023, *4 Hakim MK Beda Pendapat Soal Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK*, 4 Hakim MK Beda Pendapat Soal Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK (inilah.com).

Soehardjo dalam Saldi Isra dan Feri Amsari, *Perubahan Konstitusi Melalui Tafsir Mahkamah Konstitusi*, <
<http://feriamsari.wordpress.com/2009/01/29/perubahan-konstitusi-melalui-tafsir-mk>>.

Teguh, 2013, *Pendekatan Perundang-Undangan*, artikel dari <http://https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/>.

Tohadi, 7 Juni 2023, *Problematika Putusan MK tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK*, [Problematika Putusan MK tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK \(kompas.com\)](#).

Utami Argawati, 25 mei 2023, *Masa Jabatan Pimpinan KPK Lima Tahun*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19196>.

